



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG DHAMAR SYAKTI**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **658989**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.570.400.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/298 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000
4. Tanah Seluas 498 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 398.400.000
5. Tanah Seluas 298 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **536.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA SE88 / SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000
2. MOBIL, TOYOTA MAGH10R-BRXLBD 2.0 G HV CVT / MINIBUS
Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1A/T / SOLO Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **106.057.500**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **4.407.053.914**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.620.011.414
III. HUTANG	Rp.	13.555.611
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.606.455.803

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.